



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 141      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 140

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR .KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 157 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI  
KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SALINAN SURAT  
KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG,  
DAFTAR PENGUJI DAN MENANDATANGANI LUNAS SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA  
LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dipandang perlu untuk menunjuk kembali para pejabat yang diberi Kuasa/Wewenang untuk me-nandatangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji dan Menandatangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. bahwa penunjukan Pejabat-Pejabat dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PE-JABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/WEWE-NANG UNTUK MENANDATANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PE-RINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDATANGANI LUNAS SURAT PE-RINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

#### Pasal 1

Menunjuk Saudara Drs. Dewa Made Beratha NIP. 010049857 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menandatangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi yang meliputi pembayaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992

#### Pasal 2

Menunjuk Saudara Drs. I Made Mudartha NIP. 010041210 Pj. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali:

- a. menandatangani Surat Permintaan baik untuk Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah Otonom maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Kantor Per-bendaharaan Negara Denpasar ;

- b. menandatangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya ;\
- c. menandatangani Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji, Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Pasal 3

- (1) Menunjuk Saudara Drs. Ida Putu Kemenuh NIP. 010022803 Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan atas kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan atas kuasa Kepala Biro Keuangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Uang serta Daftar Penguji yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Menunjuk Saudara Ni Nyoman Ritaheni, B.Sc. NIP. 600006148 Kepala Sub. Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Perbendaharaan Atas Kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan atas kuasa Kepala Biro Keuangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Gaji dan Pensiun Pegawai dalam Lingkungan Pembayaran Kas Daerah Tingkat I Bali

Pasal 4

Tanda tangan dan paraf Pejabat dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Maret 1990 Nomor 134 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi Kuasa/Wewenang untuk menandatangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar, Daftar Penguji dan menandatangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 25 Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri. Keuangan Up. Direktorat Jendral Anggaran di Jakarta.
3. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar,
8. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
10. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.
11. Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia Denpasar di Denpasar.
12. Pimpinan Bank Bumi Daya Denpasar di Denpasar
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
14. Yangbersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 25 MARET 1991 NOMOR 157 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDATANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

Nama-nama dan tanda tangan serta paraf dari Pejabat-pejabat yang diberi kuasa/wewenang untuk menandatangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji dan Menandatangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

No-mor	Nama / NIP.	J a b a t a n	Tanda tangan	Paraf
1.	Drs. Dewa Made Beratha. NIP. 010049857	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.		
2.	Drs. I Made Mudartha. NIP. 010041210	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.		
3.	Drs. Ida Putu Kementuh. NIP. 010022803	Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.		
4.	Ni Nyoman Ritaheni, BSc. NIP. 600006148	Kepala Sub. Bagian Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

